

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kata Pengantar

OM Swastiastu



Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan, tuntunan dan perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Badung tahun 2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud komitmen untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan terukur atas kinerja selama tahun 2016.

Tahun 2016 merupakan ***masa transisi RPJMD 2010-2015 dengan RPJMD Semesta Berencana 2016-2021*** dan mulai diterapkannya *Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)* di Kabupaten Badung. Berdasarkan ketentuan Bab IX Perda Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011 tentang RPJMD 2010-2015, dalam rangka kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD 2010-2016 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD 2016 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2016 lebih berorientasi untuk ***memenuhi target yang belum terealisasi, meningkatkan kuantitas dan memperkuat kualitas indikator Tujuan dan sasaran sesuai RPJMD 2010-2015*** karena RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 baru ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016. Meskipun demikian hal itu tidak mengurangi upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya hal ini ditunjukkan dari kemajuan pencapaian indikator sasaran dan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat serta berbagai penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Badung.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang perlu terus di sempurnakan terutama berkaitan dengan penerapan budaya dan manajemen kinerja, kualitas indikator kinerja utama serta sinergitas antar perangkat daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan agar seirama dengan PPNSB. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sudah menjadi tekad kami untuk dapat menuntaskan permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yang ditetapkan sebagai bahan evaluasi untuk RPJMD Semester Berencana 2016-2021.

Harapan kami, agar laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi, perbaikan yang terus menerus dan memberikan motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras lagi guna terwujudnya masyarakat kabupaten Badung yang *Maju, Damai dan Sejahtera*.

Sekian dan Terima Kasih

OM Santi, Santi, Santi, OM

Mangupura, 6 Maret 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

A. Pendahuluan

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik..

Sedangkan Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dapat pula diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal yang sangat penting dan strategis dalam Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja untuk mengukur tingkat ketercapaian berbagai hasil dan manfaat yang seharusnya dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dapat direalisasikan dengan yang seharusnya terjadi atau diharapkan.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut diatas, Laporan Kinerja Tahunan ini di susun berdasarkan perjanjian kinerja yang sudah di tanda tangani untuk disampaikan kepada Gubernur, Menteri PAN dan RB, Menteri

Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Sebagai wujud komitmen ketaatan kami terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang masih mengacu pada RPJMD 2010-2015. Pelaporan Kinerja ini menjadi media pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi serta alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Informasi capaian kinerja, keberhasilan dan identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk mengambil langkah-langkah terobosan yang bersifat inovatif dalam hal perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi kinerja yang semakin baik untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

c. Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan tindak lanjut dari PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perbup Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah. Perubahan Perangkat Daerah ini berdampak signifikan terhadap berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMD, RENSTRA dan dokumen SAKIP seperti RKT, PK dan sebagainya sehingga perlu dilakukan perubahan / revisi untuk menjaga keselarasan seluruh dokumen perencanaan sebagai bagian penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2016, susunan perangkat daerah yang baru adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Bupati
4. Tiga Asisten Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
 - Bagian Pemerintahan;

- Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - Bagian Hukum dan HAM;
 - Bagian Humas;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
- Bagian Administrasi Pembangunan;
 - Bagian Administrasi Perekonomian;
 - Bagian Sumber Daya Alam;
 - Bagian Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. Asisten Administrasi Umum membidangi :
- Bagian Keuangan;
 - Bagian Umum;
 - Bagian Perlengkapan dan Perawatan;
 - Bagian Organisasi;
5. Tiga Staf Ahli terdiri dari :
- Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
6. Dua Puluh Satu Dinas Daerah terdiri dari :
- Dinas Pariwisata
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - Dinas Kebudayaan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
 - Dinas Pertanian dan Pangan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Sosial
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Dinas Perikanan
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7. Lima Badan terdiri dari :
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Inspektorat
10. Enam Kecamatan terdiri dari :
- Kecamatan Petang;
 - Kecamatan Abiansemal;
 - Kecamatan Mengwi;
 - Kecamatan Kuta Utara;
 - Kecamatan Kuta;
 - Kecamatan Kuta Selatan;
11. Serta Lembaga Teknis lainnya yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lembaga Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Adapun Lembaga Teknis tersebut terdiri dari:
1. Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Kabupaten Badung.

C. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 96 tahun 2013, Kabupaten Badung di tunjuk menjadi salah satu pilot project percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah. Penunjukan Kabupaten Badung sebagai pilot project tentu merupakan sebuah kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan

penuh tanggungjawab. Esensi dari RB adalah kemauan untuk terus berbenah, keberanian untuk berpikir dan berbuat diluar kebiasaan (*out of the box*) yang melahirkan berbagai inovasi dalam wujud efisiensi, kemudahan, percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 90 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah memuat identifikasi permasalahan yang dihadapi, cara mengatasi masalah serta memuat pula langkah cepat (*Quik Win*) yang diharapkan dapat menjadi *daya ungkit* untuk mengatasi permasalahan dan menggerakkan program RB lainnya. Seiring dengan pembentukan perangkat daerah baru, dokumen Road Map RB perlu dievaluasi kembali untuk memastikan perubahan-perubahan yang diharapkan dapat segera diimplementasikan.

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya nyata pelaksanaan Road Map RB, kami telah melakukan "*pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM*" yang dihadiri oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Ketua BPKP perwakilan Bali dan telah menetapkan beberapa unit kerja sebagai WBK / WBBM, sebagai wujud komitmen kami untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Semoga langkah mulia ini mendapat restu dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Badung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

D. Inovasi

Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas manajemen kinerja dan terwujudnya budaya kinerja di jajaran pemerintah Kabupaten Badung, kami telah melakukan berbagai langkah strategis disamping melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui bintek Sakip, merevisi dokumen perencanaan daerah, kami juga melakukan langkah terobosan yang bersifat inovatif yaitu mulai diterapkannya e-planning dan e-musrenbang dengan pengembangan system perencanaan berbasis web ini, perencanaan pembangunan diharapkan akan menjadi lebih baik serta mendorong tumbuhnya partisipasi karena masyarakat dapat mengajukan usulan melalui internet.

Salah satu hambatan dalam penerapan system akuntabilitas kinerja adalah dalam hal pelaporan kinerja khususnya berkaitan dengan ketepatan waktu, pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

akhir tahun anggaran 2016 kami telah mengembangkan system pelaporan capaian kinerja berbasis elektronik (*e-Sakip*) untuk memudahkan dalam mengendalikan capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja bekerjasama dengan Pemkot Bandung.

Saat ini sistem-sistem yang telah dibangun masih bersifat insidentil seperti e-planning, e-musrenbang, e-monev, simda keuangan, e-sakip belum terintegrasi dengan baik, namun kedepan akan diupayakan menjadi sebuah system yang terpadu dengan dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menjadi leading sector dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pengembangan e-gov menuju Kabupaten Badung sebagai Smart City.

Perubahan / Revisi RPJMD 2016-2021 :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah sesuai PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yang baru diundangkan tanggal 16 Agustus 2016 untuk menyesuaikan jumlah dan nomenklatur perangkat daerah yang baru. Momentum ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk dapat merumuskan Tujuan, Sasaran, Indikator dan target kinerja yang semakin berkualitas. Mengingat proses revisi diperkirakan selesai pada bulan Juni 2017, akan berdampak beberapa dokumen perencanaan dan dokumen AKIP yang bersifat rancangan / draft.

E. Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)

Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi hulu, tengah dan hilir telah diimplementasi dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 dan mulai diwujudkan pada Perubahan APBD 2016. PPNSB sebagai model baru dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung, membutuhkan dukungan jajaran birokrasi yang memiliki integritas dan berkinerja tinggi serta diperlukan sinergitas antar perangkat daerah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, efisien dan akuntabel.

F. Perkembangan Nilai LAKIP

Kata Kunci keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah "*Komitmen bersama*". Berkat komitmen yang kuat dari segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, secara perlahan namun pasti system akuntabilitas kinerja mulai bisa di pahami. Tekad, kerja keras dan bimbingan dari Kementerian PAN dan RB telah mengantarkan nilai LAKIP Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup berarti, walaupun kami menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Perkembangan Nilai LAKIP sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT NILAI 2009-2014	BOBOT NILAI 2015	Nilai evaluasi tahun					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Perencanaan Kinerja	35	30	10,31	19,45	23,05	25,19	24,92	24,97
2.	Pengukuran Kinerja	20	25	2,93	10,42	13,46	13,96	18,96	18,98
3.	Pelaporan Kinerja	15	15	7,63	8,48	9,75	10,93	11,08	11,15
4.	Evaluasi Kinerja	10	10	1,02	4,96	6,22	5,80	6,57	6,91
5.	Capaian Kinerja	20	20	12,39	11,99	13,44	13,24	14,34	14,36
NILAI EVALUASI		100	100	34,27	55,31	65,92	69,12	75,89	76,37
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			C	C	CC	B	B	BB	BB

G. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%) capaian
1	2	3	4	5	6	
1.	Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di	1. Jumlah konflik SARA	Konflik sara	0	0	100%

	Kabupaten Badung					
2.	Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Badung yang dinamis, dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras	2. Persentase desa adat yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari	%	70.49%	70.49%	100%
		3. Persentase sekaa teruna yang memenuhi tatanan yang ditetapkan (lestari)	%	5.24%	5.24%	100%
3.	Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah.	4. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun	%	100%	100%	100%
		5. Angka Melek Huruf	%	100%	100%	100%
4.	Terciptanya kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut/tinggi.	6. Persentase lulusan pendidikan yang diterima di jenjang menengah	%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya status kesehatan ibu, bayi dan balita	7. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	kh	60/ 100.000	0	200%
		8. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	kh	4.5/ 1.000	3.5/1000	122.22
		9. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	kh	5/ 1.000	4.04/1000	119.20
6.	Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai tingkat puskesmas,	10. Cakupan pelayanan puskesmas dengan standar ISO	%	100%	100%	100%

	rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.	11. Cakupan pelayanan Rumah Sakit dengan standar terakreditasi	-	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	12. Cakupan kemandirian posyandu purnama dan mandiri	%	98.50%	98.08%	99.57%
		13. Cakupan desa siaga aktif	%	100%	100%	100%
		14. Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	%	79.2%	81.51%	102.92%
8.	Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.	15. Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan:	%	98%	98,12%	100,12%
		1. Persentase keluarga yang memiliki KK				
		2. Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	85%	86,42%	101,67%
		3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	77,5%	81,84%	105,6%
		4. Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	%	100%	114,53%	114,53%
9.	Terpenuhinya pelayanan Keluarga Berencana yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung	16. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	0,12%	0,12%	100%

10.	Mempermudah, memperlancar dan memperluas akses masyarakat miskin maupun cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dalam memanfaatkan sumberdaya ekonomi secara adil dan terbuka.	17. Persentase penurunan penyandang masalah sosial	%	62,95%	62,95%	100%
11.	Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung	18. Persentase koperasi sehat dan berkualitas	%	43.36%	44.1%	103.4%
		19. Persentase peningkatan nilai ekspor UKM	US\$	52.160.500,00 US\$	80.611.763,90 US\$	154.54%
12.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan	20. Jumlah produksi hasil komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan	TON	174.500	148.974,40	85,37
		21. Tingkat produktivitas bahan pangan utama (padi)	KW/HA	64	63,77	99,64
13.	Meningkatnya kuantitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan	22. Jumlah populasi peternakan	Ekor	1.495.000	1.603.051	100,7%
		23. Jumlah produksi perikanan dan kelautan	Ton	6.890,05	7.054,32	102.38%
14.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	24. Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Pelanggaran	1.400	1526	91%
15.	Meningkatnya Pelayanan dalam Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban	25. Persentase laporan mengenai gangguan ketentraman dan ketertiban yang direspon dalam kurun waktu kurang dari 1 hari setelah laporan diterima	%	70%	68,15%	97,35%
16.	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja dan	26. Opini Pemeriksaan BPK	Opini	Wtp	-	-

	tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.	27. Peningkatan pendapatan asli daerah	Rp	3.195.340.365	3.471.341.982	108,32 %
17.	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel	28. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	75,95	76.37	100.55%
18.	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.	29. Perencanaan tata ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten	Dokumen	3	2 Rancangan	-
		30. Prosentase Jaringan irigasi berkondisi baik	%	94.72%	94.72%	100%
19.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembanguann lainnya untuk membangun sesuai dengan rencana tata ruang	31. Prosentase lahan terbangun sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	%	68.51%	67.91%	99.12%
20.	Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, Berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan akan ditempuh melalui strategis pembangunan yang seimbang antar wilayah.	32. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C ratio)	(V/C ratio)	0,59	0.55	107.2
		33. Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light	%	82,35%	82,35%	100%
21	Meningkatnya kualitas pelestarian lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten Badung menuju Badung yang	34. Persentase sumberdaya air yang memenuhi baku mutu air:	mg/lt	50	22,81	154%

	bersih dan hijau.	• COD air sungai				
		• BOD air sungai	mg/lit	6,00	6,30	95 %
		• BOD air laut	mg/lit	10	5,22	148 %
		35. Persentase sumberdaya udara yang memenuhi standar baku mutu (NO2)	µg/m ³	400	32,97	191 %
		36. Persentase perusahaan yang menggunakan pengolahan limbah	Perusahaan	80	80	100%

H. Capaian Kinerja Pembangunan lainnya

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan keluarga, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 76,63, tahun 2014 meningkat 77,98 dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 78,86. Indeks ini merupakan komposit dari tiga komponen yaitu komponen kesehatan direpresentasikan dari besaran angka harapan hidup, komponen pendidikan melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta komponen ekonomi dari daya beli masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan ketimpangan gender melalui kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan, ketrampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak. Tahun 2012 IPG Kabupaten Badung 75,27, tahun 2014 meningkat 75,30, tahun 2015 menjadi 75,47 sedangkan tahun 2016 meningkat 75,69.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan daerah. Sebagai daerah tujuan pariwisata utama di Bali, Kabupaten Badung mengandalkan PAD dari sektor pariwisata

khususnya Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Berkat kerja keras dari segenap jajaran pemerintahan dan masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi wisatawan dan indikator kinerja pemerintah daerah yang mendukung sektor pariwisata, PAD Kabupaten Badung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung dalam 5 tahun terakhir :

No	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		TARGET	REALISASI
1.	2.	3.	4
1	2011	1.155.384.375.023,92	1.406.298.099.449,01
2	2012	1.587.437.906.151,00	1.872.346.181.795,69
3	2013	2.029.161.138.232,59	2.279.053.294.585,67
4	2014	2.475.804.904.020,18	2.722.625.562.620,69
5	2015	2.832.034.079.488,77	2.992.023.095.763,06
6	2016	3.195.340.365.380,70	3.471.341.597.707,20

I. PRESTASI / PENGHARGAAN 2016

No	Penghargaan	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1	Lakip Badung Raih Nilai BB	Evaluasi Lakip Badung Tahun 2015	15 Januari 2016	Penghargaan Oleh Kemenpan-Rb
2	Bhakti Yudha Bramajaya	Hut Ke-97 Pemadam Kebakaran	01 Maret 2016	Penghargaan Oleh Pemadam Kebakaran
3	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016 Melalui Program Pencegahan Kanker Serviks	Simposium Dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016	31 Maret 2016	Penghargaan Oleh Kemenpan-Rb
4	Nominator Idea 2016	Indonesia Digital Economy Award 2016	11 Mei 2016	Penghargaan Oleh Kementerian Komunikasi & Informatika RI

5	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp)	Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015	02 Juni 2016	Penghargaan Oleh Bpk Ri
6	Juara I Bidan Praktek Mandiri Pelayanan Kb Tingkat Nasional	Penilaian Pelayanan Kb Tingkat Nasional	16 Juli 2016	Penghargaan Oleh Bkkbn
7	Nominasi Lomba Desa Tingkat Nasional	Temu Karya Nasional	04 Agustus 2016	Penghargaan Oleh Kemendagri Ri
8	Juara Iv Kategori Evaluasi Perkembangan Desa	Temu Karya Nasional	16 Agustus 2016	Penghargaan Oleh Kemendagri Ri
9	Juara Iii Lomba Menulis Artikel	Lomba Menulis Artikel Dan Karya Jurnalistik Nasional	18 Agustus 2016	Penghargaan Oleh Kemenbudpar ` Ri
10	Tokoh Pertanian	Bali Mandara Parama Nugraha	29 Agustus 2016	Penghargaan Oleh Pemprov Bali
11	Kabupaten Terbaik Nasional Dengan 3 Posisi Terbaik Kategori Pariwisata	Indonesia's Attrctiveness Awards	22 Septembe r 2016	Penghargaan Oleh Tempo Media Group
12	Natamukti Satria	Penghargaan Icsb Indonesia Presedential Award 2016	29 November 2016	Penghargaan Oleh Icsb Indonesia
13	Penghargaan Indeks Kepariwisataa	Rakornas Iv 2016 Kementerian Pariwisata Ri	06 Desember 2016	Penghargaan Oleh Kementerian Pariwisata Ri
14	Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik	Penganugrahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	07 Desember 2016	Penghargaan Oleh Ombudsman Ri
15	Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pemahaman Publik Pelayanan Terbaik			
16	Runner Up Putri Maritim Nasional	Lomba Putra Dan Putri Maritim Tingkat Nasional	07 Desember 2016	Penghargaan Oleh P3mi Nasional
17	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp)	Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015	19 Desember 2016	Penghargaan Oleh Kementerian Keuangan Ri
18	Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor	Penilaian Pppa Republik Indonesia	21 Desember 2016	Penghargaan Oleh Kementerian Ppa Ri